

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki melalui berbagai aktivitas atau program. Meningkatkan kemampuan masyarakat dilakukan dengan cara memberi kesempatan, dukungan dan perlindungan dalam mengelola program kegiatan pemberdayaan (Devi Deswimar, 2014). Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dan kekuatan kepada perempuan guna menciptakan perempuan yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki pada diri mereka (Putri, 2021). Menurut Longwe dalam Ismi pemberdayaan perempuan adalah suatu proses penguatan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik berdasarkan relevansi antara kebebasan individu dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat (Nurhaeni, 2022). Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilaksanakan dengan tanpa ikut campur pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa berfikir, berperilaku dan bersikap untuk lebih maju guna tercapainya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera sesuai dengan harkat dan martabatnya (Suharto, 2018).

Pada awal tahun 2022 Bupati Ponorogo merilis program-program pembangunan. Program pembangunan tersebut dari dana RT (Rukun Tetangga) tahun 2022 yang dijalankan oleh pengurus RT. Program pembangunan ini dilaksanakan setelah Bupati Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 140/913/405.14/2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga (PPAK RT). Surat Edaran (SE) ini digunakan untuk petunjuk dan acuan dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan menggunakan dana sebesar 10 juta rupiah per tahun. Pencairan dana tersebut 1

dilakukan secara bertahap. Pencairan pertama sebesar 7,5 juta rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk dan pencairan kedua sebesar 2,5 juta rupiah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Daerah (Prokopim, 2022).

Program pembangunan diharapkan dapat memantik pembangunan dan perubahan fundamental dari lingkup lingkungan paling kecil. Program pembangunan ini terdapat delapan program diantaranya, Program Nabung Air, Program Sampah Terpadu (SAHDU), Program Menanam Obat Keluarga (INPOMOKEL), Program Internet Masuk Rukun Tetangga (INPOMASE), Program Rembuk Rukun Tetangga, Program Intensif Pengurus Rukun Tetangga, Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Pengurus Rukun Tetangga dan Program Satu RT Satu Kelompok (SATE KOPOK) yang ditujukan untuk perempuan untuk memantik penguatan ekonomi perempuan Rumah Tangga dan mempercepat pemulihan ekonomi (Surat Edaran Bupati, 2022).

Sate Kopok (Satu RT Satu Kelompok) merupakan salah satu program yang ditujukan untuk perempuan Rukun Tetangga. Salah satu kendala yang dialami oleh perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Kendala utama para pengusaha mikro (perempuan) adalah ketidakterediaan modal untuk mengolah usahanya karena kebutuhan rumah tangga. Dengan tidak tersedianya modal, maka perempuan sering menjadi korban pembiayaan modal usaha dengan bunga yang besar (Sulikanti, 2012). Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-

19 mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ponorogo mengalami kontraksi penurunan hingga -0,9% (Surat Edaran Bupati, 2022). Dengan adanya kendala tersebut, maka Bupati Ponorogo membuat program Sate Kopok. Pemberdayaan ini diharapkan perempuan mampu berdaya tanpa takut jerat lintah darat, mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemulihan ekonomi pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dimulai dari tingkat RT. Program Sate Kopok dianggarkan dana sebesar 1 juta rupiah. Bentuk kegiatan Program Sate Kopok adalah memberikan dukungan dana dalam bentuk belanjaan barang kepada Kelompok Perempuan Tingkat RT untuk dikelola agar dana tersebut dapat

berkembang secara berkelanjutan. Sebelum adanya penyerahan masing-masing pengurus RT harus bermusyawarah dahulu dengan Perempuan RT tentang pengelolaan dana tersebut agar dapat berkembang (Media Ponorogo.id, 2022).

Salah satu kecamatan yang menjalankan program Sate Kopok adalah Kecamatan Sampung. Kecamatan Sampung memiliki jumlah Desa sebanyak 12 desa, dan jumlah RT sebanyak 320 RT (BPS Ponorogo, 2021). Dimana masing-masing RT mendapatkan dana sebesar satu juta rupiah untuk melaksanakan program Sate Kopok dalam bentuk barang. Agar terwujudnya pembangunan ekonomi dari sektor bawah maka dalam melaksanakan program tersebut harus berjalan secara efektif. Berdasarkan observasi awal dan wawancara penulis kepada beberapa *stakeholder* di Kecamatan Sampung dalam melaksanakan program Sate Kopok, terdapat indikasi kendala yang penulis temukan diantaranya kerumitan para *stakeholder* terkait dengan program Sate Kopok dan perbedaan pelaksanaan program Sate Kopok di setiap desa.

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan diatas, untuk mengatasi kendala tersebut diperlukannya evaluasi program. Evaluasi program pemberdayaan masyarakat diperlukan agar pembangunan fokus terhadap pengembangan diri, dimana pengembangan diri ditandai dengan perilaku masyarakat dalam memberdayakan diri melalui program atau kegiatan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan program menurut pandangan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini apakah masyarakat benar-benar berdaya secara berkelanjutan atau hanya bergantung dari program pemberdayaan tersebut (Cornelius dan Daru, 2013). Maka dari itu, untuk mengetahui persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program (efisien) dan mengetahui pelaksanaan terhadap tujuan program (efektivitas) maka diperlukan evaluasi program Sate Kopok secara sistematis terhadap ketentuan dan hasil (*output*) (Agusta, 2002).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan kendala diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi program Sate Kopok di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Sate Kopok?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui evaluasi terkait dengan program Sate Kopok di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sate Kopok.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dalam penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang sosial dan politik serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban bagi penulis terkait kendala yang dikaji dan memberikan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengenai evaluasi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat “Sate Kopok”.

## **E. PENEKASAN ISTILAH**

### **1. Evaluasi Program**

Evaluasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Evaluasi program adalah menganalisis tingkat keberhasilan program dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara sistematis (Agustanico, 2017).

### **2. Sate Kopok**

Sate Kopok merupakan singkatan dari Satu RT Satu Kelompok. Sate Kopok merupakan salah satu dari delapan program pembangunan bupati Ponorogo. Program ini ditujukan kepada para perempuan Rumah Tangga. Tujuan dilaksanakan program ini untuk memantik penguatan ekonomi perempuan dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Ponorogo (Surat Edaran Bupati, 2022).

### **3. Rukun Tetangga (RT)**

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang “Rukun Tetangga dan Rukun Warga” menjelaskan bahwa RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui muasyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Konsep Evaluasi Program**

Secara umum, evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dari suatu program yang digunakan untuk mengambil keputusan, seperti menyempurnakan lebih lanjut atau menghentikan program (Dewi, 2016). Menurut Arikunto (2002) dalam Ratnsari (2016) mendefinisikan evaluasi adalah mengukur dan menilai. Dalam hal ini mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran (kuantitatif), sedangkan menilai adalah mengambil keputusan yang mengacu pada ukuran baik atau buruk (kualitatif). Dalam evaluasi memerlukan dua langkah tersebut, yaitu mengukur dan menilai. Dalam hal ini dapat disimpulkan evaluasi adalah menilai akan tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu (Dewi 2016).

Menurut Dale (2004) dikutip dalam Sulastri dkk, (2016) evaluasi diartikan sebagai proses kegiatan penelitian terhadap program atau hasil yang dicapai oleh pelaksana program yang bersifat menyeluruh dan dilaksanakan pada waktu tertentu (Sardjo dan Boediono, 2016). Selain untuk mengetahui *impact* atau hasil program, evaluasi juga mencakup berbagai aspek diantaranya efektivitas, efisiensi, relevansi kegiatan, kontinyu, dan replikasi program. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebab-akibat, apakah program tersebut memberi perubahan dan faktor apa saja sehingga perubahan itu bisa terjadi. Dengan adanya pertanyaan sebab-akibat tersebut maka diperoleh indikator yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan (Sardjo dan Boediono, 2016). Ditinjau dari waktu pelaksanaan, evaluasi dibedakan menjadi dua jenis diantaranya evaluasi hasil atau evaluasi sumatif dan evaluasi proses atau formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat program itu berlangsung. Evaluasi formatif dilakukan dengan mengacu pencapaian yang diperoleh dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pada saat pelaksanaan program tersebut. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setelah kegiatan atau program tersebut berlangsung dengan cara melihat hasil. Pada evaluasi hasil atau sumatif diperoleh faktor-faktor yang menghambat atau

mendorong keberhasilan atau kegagalan program dan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan guna mencapai tujuan program. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengetahui dampak atau manfaat yang diperoleh setelah program pembangunan dilakukan. Selain itu, evaluasi sumatif dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ataupun lembaga pendonor program yang memiliki karakteristik yang sama seperti program yang telah dijalankan tersebut (Fox dkk, 2007).

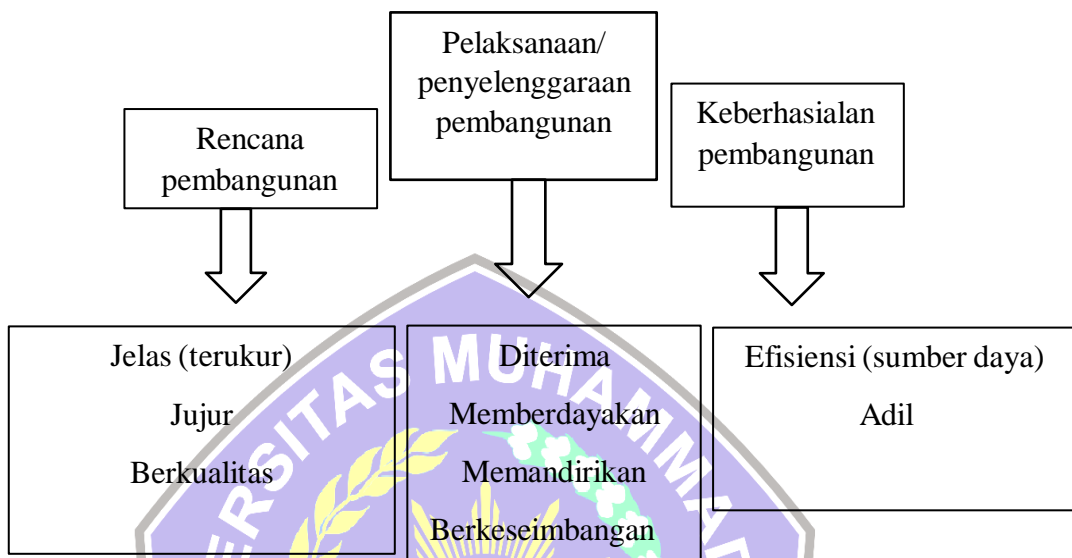
Program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, program merupakan kesimpulan dari beberapa tujuan yang saling melengkapi dan bergantung yang dilaksanakan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Program berada dibawah naungan suatu organisasi dengan sasaran yang saling melengkapi dan bergantung yang dilakukan secara bersama dan berurutan. Dari penjelasan tersebut, program memiliki tiga unsur diantaranya perencanaan, bertujuan dan keberhasilan (Ratnasari, 2016). Evaluasi program merupakan kegiatan investigasi terhadap suatu objek yang berharga dan bernilai. Ketentuan-ketentuan yang ditemukan dijadikan indikator-indikator untuk menilai kinerja pada setiap proses evaluasi. Berdasarkan definisi evaluasi program diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses untuk mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi hasil dan membandingkan apa yang telah dicapai pada pelaksanaan program dengan apa yang harus dicapai yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tujuan dari program (Muryadi, 2017).

Menurut Nugroho (2023) evaluasi kebijakan ada dua karakteristik ,yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat gampang untuk di pelajari, karena maknanya adalah hal hal yang di kerjakan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.
2. Kebijakan publik merupakan yang mudah di ukur, dikarenakan ukuranya yang sangat jelas yaitu sejauh mana pencapaian yang dituju sudah di tempuh.

Proses kebijakan publik merupakan runtutan aktivitas intelektual yang di adakan di dalam proses kegiatan yang politis. Politis tersebut muncul dalam rangkaian kegiatan yang mencakup susunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan Gerakan perumusan masalah, *foresacting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih intelektual (Meutia, 2017).



Gambar 1.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Sumber : Kebijakan publik Dr.Riant Nugroho

## 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mendorong masyarakat berinisiatif untuk melakukan suatu kegiatan atau program guna memperbaiki kendala atau isu strategis yang terjadi. Kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah ikut berpartisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif untuk mengikuti, memperbaiki kendala yang terjadi (Maryani dan Nainggolan 2019). Menurut Aziz dkk, (2005) yang dikemukakan oleh Ratnasari (2016) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang ditujukan terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses dalam sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam pengembangan kehidupan.



Pemberdayaan masyarakat juga sebagai proses partisipatif antara masyarakat yang bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut Medekhsn Ali, (2007) yang dikemukakan oleh Ratnasari (2016) Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses untuk membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap orang lain. Elemen pokok yang paling penting dalam pemberdayaan yaitu pasrtisipasi masyarakat yang diberdayakan, dengan adanya partisipasi masyarakat maka dapat memobilisasi potensi atau sumber daya lokal, mengorganisir serta mendorong kreativitas masyarakat dan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan masyarakat (Dewi , 2016) .

Pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sasaran yang paling tepat yaitu masyarakat yang strata sosialnya rendah. Mengingat pada setiap daerah tidak semua masyarakatnya mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama. Masyarakat yang mempunyai kesejahteraan tinggi tidak bergantung kepihak lain untuk menjalani kehidupannya, dalam arti mandiri. Sedangkan masyarakat yang tergolong menengah kebawah cenderung bergantung kepihak lain. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan dengan cara melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dalam hal ini berarti yang mendidik. Artinya hal tersebut akan membantu secara sementara dan membentuk mental mereka untuk dapat bekerja yang lebih baik guna memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tercapainya masyarakat yang mandiri (Maryani dan Nainggolan 2019). Memberdayakan masyarakat berarti melakukan upaya untuk meningkatkan harkat martabat dengan cara memandirikan, mengembangkan dan menswadayakan diberbagai sektor bidang sehingga dapat terlepas dari kemiskinan (Ratnasari, 2016).

Dalam melakukan program pemberdayaan diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip pemberdayaan maka kesuksesan program masyarakat akan lebih mudah untuk dicapai. Menurut Dedeh dan Ruth (2019) terdapat empat prinsip diantaranya :

- 1) Prinsip Kesetaraan; pada program pemberdayaan harus memegang prinsip kesetaraan antara masyarakat yang diberdayakan dengan lembaga pemberdayaan guna mengembangkan mekanisme dalam berbagai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki satu sama lain. Maka dari itu terbentuknya kerjasama untuk saling membantu, saling belajar dan tukar pengalaman sehingga terbentuknya masyarakat yang mandiri.
- 2) Prinsip Partisipasi ; untuk membangun kemandirian masyarakat adalah kegiatan yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi oleh masyarakat yang diberdayakan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk selalu melakukan pendampingan selama program berlangsung sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya.
- 3) Prinsip Kemandirian ; prinsip kemandirian dalam pemberdayaan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Pada konsep ini tidak memandang masyarakat miskin sebagai objek saja melainkan sebagai subjek dimana mereka mampu sesuai dengan kemampuannya. Mereka memiliki kemampuan untuk menampung pengetahuan, sehingga pendamping pemberdayaan disini tidak hanya memberi ikan saja melainkan memberi kail supaya masyarakat mampu mengembangkan sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri.
- 4) Prinsip Berkelanjutan ; kegiatan pemberdayaan harus dirancang sedemikian rupa agar bisa berkelanjutan. Program pemberdayaan harus memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan pengalaman sehingga masyarakat mampu berdiri di kaki sendiri untuk mengolah programnya tanpa bergantung pada proses pendampingan (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Pemberdayaan masyarakat diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Menurut Soekanto (1987) dalam kutipan sy dan Ruth (2019) pemberdayaan memiliki tujuh tahapan, diantaranya :

- 1) Tahap Persiapan ; pada tahap ini terdapat dua hal penting yang harus dilakukan diantaranya menyiapkan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan sasaran.
- 2) Tahap Pengkajian ; pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian kendala- kendala sehingga tau akan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki sasaran program pemberdayaan sehingga kegiatan pemberdayaan dapat dijalankan.
- 3) Tahap Perencanaan ; tahap perencanaan lembaga pemberdayaan harus melibatkan masyarakat yang diberdayakan untuk membahas masalah yang dihadapi dan solusi apa yang harus dilakukan sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 4) Tahap Performalisasi Rencana Aksi : pada tahap ini lembaga pemberdayaan membantu masyarakat yang diberdayakan untuk merumuskan dan menentukan program apa yang cocok dilaksanakan guna mengatasi kendala yang ada dan membantu masyarakat untuk mengorganisir pemikiran masyarakat dalam bentuk tertulis.
- 5) Tahap Implementasi Kegiatan ; pada tahap ini peran masyarakat sebagai subjek pemberdayaan guna menjaga keberlanjutan program yang dikembangkan sangat penting, oleh karena itu diperlukan sosialisasi terkait maksud, tujuan dan sasaran program secara terperinci dan jelas untuk menghindari penyelewengan pada saat pelaksanaan.
- 6) Tahap Evaluasi ; evaluasi dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat yang diberdayakan sehingga terbentuk komunitas pengawasan internal dan membangun komunikasi masyarakat lebih mandiri yang memanfaatkan potensi yang ada. Pada tahap ini diharapkan dapat mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program sehingga dapat dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan program berikutnya.
- 7) Tahap Terminasi ; pada tahap ini dilakukan memutus hubungan antara lembaga pemberdayaan dengan masyarakat sasaran secara formal. Dalam tahap ini

diharapkan masyarakat mampu menjalankan hidupnya dengan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa bergantung dengan pihak manapun (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Program Satu RT Satu Kelompok (Sate Kopok) adalah program pemberdayaan masyarakat perempuan yang dirilis oleh Bupati Ponorogo. Program Sate Kopok bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi di Ponorogo melalui penguatan ekonomi perempuan tingkat RT. Program Sate Kopok di anggarkan dana sebesar Rp. 1.000.000,00 yang dialokasikan dalam bentuk bahan pokok rumah tangga.

1. Mekanisme Kegiatan

- a. Kepala Desa menyerahkan dana dalam bentuk barang berupa bahan pokok rumah tangga ke Kelompok Perempuan
- b. Pengelolaan administrasi pelaksanaan program Sate Kopok adalah Kelompok Perempuan RT
- c. Alokasi dana dalam bentuk barang berupa bahan pokok rumah tangga diserahkan kepada Kelompok Perempuan RT berdasarkan hasil rembuk RT.
- d. Pelaporan di akhir periode diharapkan dana berkembang

2. Mekanisme Pelaksanaan

- a. Kepala Desa memberikan sosialisasi terkait dana program Sate Kopok yang dialokasikan dalam bentuk barang berupa bahan pokok rumah tangga
- b. Ketua RT melakukan rembuk RT terkait dengan kesepakatan pengurus Kelompok Perempuan RT dan teknis pengelolaan program
- c. Ketua RT melaporkan hasil rembuk RT
- d. Kepala Desa membelanjakan barang sesuai dengan kesepakatan rembuk RT
- e. Penyerahan barang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dilengkapi dengan bukti pembelian barang
- f. Ketua RT menyerahkan barang kepada Kelompok Perempuan RT

### 3. Mekanisme Pembinaan

- a. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Dinar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Tata Pemerintahan dan Sekretariat Daerah melakukan pembinaan terkait teknis dan ketentuan pengorganisasian kelompok masyarakat dan Aparat Pemerintahan Desa
- b. Camat memvalidasi penggunaan dana program Sate Kopok
- c. Kepala Desa membuat pelaporan keuangan melalui pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 4. Mekanisme Monitoring

- a. Kepala Desa memastikan pengelolaan dana program Sate Kopok Kelompok Perempuan RT
- b. Camat memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Dinar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Tata Pemerintahan dan Sekretariat Daerah memastikan Kepala Desa dan RT melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

### 5. Mekanisme Pelaporan

- a. Kelompok Perempuan RT melakukan laporan pengelolaan dana di akhir periode
- b. Kepala Desa membuat pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan .

## 3. Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya menguatkan perempuan dalam berbagai bidang, diantaranya dalam ekonomi, sosial dan politik. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipatif dalam upaya pembangunan (Nurhaeni, 2022). Pemberdayaan perempuan akan memberikan dampak positif dalam perubahan sosial, ekonomi maupun politik dan

meningkatkan kualitas bangsa. Pemberdayaan perempuan seharusnya menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan, tidak hanya menjadikan perempuan sebagai pihak yang tertindas karena kebudayaan setempat dan struktur ketidakadilan. Ketidakadilan gender dapat dilihat dari dampak suatu program atau kebijakan, norma dan kebudayaan masyarakat setempat. Program pembangunan yang diterbitkan oleh para pemangku kepentingan selama ini hanya menjadikan perempuan sebagai obyek yang pasif dengan alasan perempuan dianggap tidak mampu karena keterbatasan gendernya. Kendala pemberdayaan perempuan tersebut masih menganggap perempuan itu lemah padahal perempuan memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan (Putri, 2021).

#### **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasional merupakan alat ukur suatu variabel pada penelitian. Pada hal ini yang dimaksud adalah indikator yang ada dapat memberi penilaian terhadap variabel yang dilihat sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel penelitian harus ditetapkan untuk menghindari kesesatan dalam proses pengumpulan data. Berikut adalah definisi operasional pada penelitian ini, terkait dengan implementasi program Sate Kopok di Kecamatan Sampung :

1. Prinsip Kesetaraan untuk mengetahui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro serta dinas terkait, Aparat Pemerintahan Desa, Aparat Pemerintahan Kecamatan, dan Kelompok Perempuan RT dalam pelaksanaan program Sate Kopok
2. Prinsip Partisipasi untuk mengetahui pembinaan dan monitoring terhadap kendala yang dialami Kelompok Perempuan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa, Aparat Pemerintahan Kecamatan, dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro serta dinas terkait
3. Prinsip Kemandirian untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan dana program Sate Kopok yang dilaksanakan oleh Kelompok Perempuan tingkat RT

4. Prinsip Berkelanjutan untuk mengetahui teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan SE Bupati

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan mengamati, memahami dan mempelajari fenomena tentang yang dialami oleh objek penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara ilmiah dengan menggunakan berbagai cara ilmiah (Moelong, 2004). Menurut Mohamed dkk, (2010) yang dikutip oleh Syaiful Anam, dkk (2022) mengatakan dalam penelitian kualitatif lebih memahami pada interaksi unsur-unsur yang terlibat pada suatu objek seperti lembaga, manusia dan benda untuk mempelajari suatu kejadian atau fenomena (Anam et al. 2023). Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Miza dkk, (2022) penelitian kualitatif adalah menafsirkan dalam bentuk ilmiah tentang fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode. Dalam hal ini untuk mengetahui dan menggambarkan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian terhadap kehidupannya sendiri (Adlini dkk, 2022).

Pada penelitian ini pendekatan yang sesuai tepat dan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti suatu fenomena (kasus) yang terjadi pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dalam metode studi kasus dapat menggali informasi tentang pengalaman pihak-pihak dalam pemberdayaan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus adalah peneliti lebih mudah untuk berinteraksi dengan keadaan secara langsung dan dapat lebih mudah menggali informasi-informasi tentang fenomena yang terjadi secara detail (Anam dkk, 2023).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat kegiatan penelitian berlangsung untuk mengetahui dan mempelajari fenomena yang terjadi guna memperoleh sekumpulan data yang akurat. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kesesuaian dengan topik yang dipilih, kemenarikan dan keunikan. Menurut Nasution dalam kutipan Heru mengatakan bahwa lokasi merujuk pada suatu tempat dalam arti lokasi sosial yang memiliki tiga unsur diantaranya program, manusia dan tempat yang bisa diobservasi (Oxtavianus dan Margono, 2015). Penelitian ini dilakukan pada beberapa desa di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Adapun desa tersebut diantaranya, Desa Kunti, Desa Pohijo, dan Desa Sampung. Peneliti memilih lokasi tersebut didasari karena peneliti menemukan indikator kendala pada pelaksanaan program pemberdayaan Sate Kopok seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas.

## 3. Penentuan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberi informasi terkait dengan objek. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Sampung (*stakeholder*), Aparat Pemerintahan Desa, dan Perempuan Rukun Tetangga (sasaran program). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik dalam memilih informan diperlukan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria dan bersifat terbuka tentang pengalaman yang dilakukan. Informan tersebut adalah informan penguasa dan informan yang mengetahui, memahami dan menjalankan Program Sate Kopok (Satu RT Satu Kelompok). Informan yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* diantaranya Camat, Kepala Desa pemerintahan kecamatan Sampung, dan Kelompok Perempuan RT.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data. Pemahaman dalam teknik pengumpulan data maka akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sesuai dengan standar. Teknik pengumpulan data merupakan teknik mengumpulkan data sebagai bahan analisis (KJ. Veeger, 2003). Pada penelitian ini, data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengamatan partisipasi terhadap aparat kecamatan, aparat desa, dan kelompok perempuan yang diberdayakan. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh secara studi Pustaka seperti literature, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan pewawancara dan terwawancara guna untuk memperoleh informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Creswell (2013) dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara tatap muka, melalui telepon maupun wawancara dalam kelompok (Iii 2019). Menurut Moleong (2002) pada kutipan Kaharudin (2021) wawancara diklasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya ; wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur dan wawancara tidak struktur.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi-struktur. Wawancara semi struktur merupakan wawancara dengan pertanyaan mengacu pada pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diwawancarakan bisa keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat sehingga wawancara lebih mendalam dan data yang diperoleh lebih lengkap. Menurut Barlow (2010) dalam Abdul & Lydia (2019) wawancara semistruktur ialah wawancara dengan menggabungkan jawaban dari informan secara bersama-sama sehingga dapat memperoleh jawaban yang lebih mendalam (Zuhri dan Christiani 2019). Menurut Creswell (2013) dalam N. De, M. Sinthania, Pahleviannur, A. Grave dkk, (2022) menjelaskan bahwa selama proses wawancara berlangsung

peneliti harus mengembangkan dan menggunakan protokol wawancara untuk mengajukan pertanyaan dan merekam hasil wawancara (De dkk, 2022). Hasil wawancara dapat ditulis dengan catatan tangan ataupun alat perekam, akan tetapi lebih baik menggunakan catatan tangan untuk menghindari gagalnya alat perekam.

## 2. Observasi

Menurut Adler & Adler (1987) dalam kutipan Hasyim (2016) menjelaskan observasi adalah salah satu dasar dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif (Hasanah, 2017). Observasi merupakan kegiatan mengamati terhadap objek penelitian secara langsung dengan menjangkau data yang tidak terjangkau dan mencatat data yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi natural. Observasi natural merupakan observasi yang dilakukan terhadap subjek penelitian secara alamiah tanpa adanya manipulasi terkait perilaku subjek sehingga akurasiya baik (Hasanah, 2017). Observasi dilakukan selama satu bulan dengan mengamati aktivitas para informan dalam melaksanakan program Sate Kopok.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data atau hal-hal dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, catatan dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi kehilangan data maka dilakukan pencatatan dengan lengkap dan akurat pada saat pengambilan data di lapangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data dari dokumen orang lain maupun data catatan penulis sendiri. Menurut Abdul dan Lydia (2019) menjelaskan data-data yang diperoleh pada wawancara dan observasi akan lebih kredibel dan data yang belum diperoleh dapat didapatkan pada metode dokumentasi (Zuhri dan Christiani, 2019).

## 5. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menentukan kebenaran data yang diperoleh peneliti apakah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pada penelitian

ini pengujian kebasahan data menggunakan triangulasi. Menurut Denzin (1978) dalam Hakim (2021) triangulasi merupakan langkah dalam memadukan data dari berbagai sumber data, teori, peneliti, dan metode pada penelitian terhadap fenomena tertentu (Hakim, 2021). Dengan dilakukannya triangulasi ialah untuk melindungi penelitian dari kekurangan sumber karena hanya menggunakan sumber data, peneliti, metode dan teori tunggal dan melindungi penelitian dari berbagai prasikap. Terdapat empat kategori teknik triangulasi diantaranya, triangulasi data, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.

Dari keempat kategori teknik triangulasi, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Meolong (2007) dalam hakim (2021) triangulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda akan tetapi menggunakan teknik yang sama (Hakim, 2021).

## **6. Metode Analisa Data**

Menurut Herdiansyah (2013) dalam Alief dkk, (2015) metode analisis data pada penelitian kualitatif dimulai pada awal penelitian hingga akhir penelitian, analisis data digunakan untuk mengkategorikan sesuai dengan temanya. Sebuah penelitian tanpa dilakukan analisis hanya menghasilkan data mentah yang tidak bermakna, dan dengan dilakukannya analisis penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut menjadi teori baru yang dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan (Setyanto, Samodra, dan Pratama 2015).

Pada penelitian ini, model yang digunakan penulis adalah model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam Wanto (2018) sebagai berikut (Wanto, 2018):

### **a. Pengumpulan data (*data collection*)**

Pada pengumpulan data, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat,

sehingga terbentuk informasi yang bermakna. Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada informan kunci dan

informan pendukung yang menjalankan program Sate Kopok (Satu RT Satu Kelompok).

b. Kondensasi data (*data condensation*)

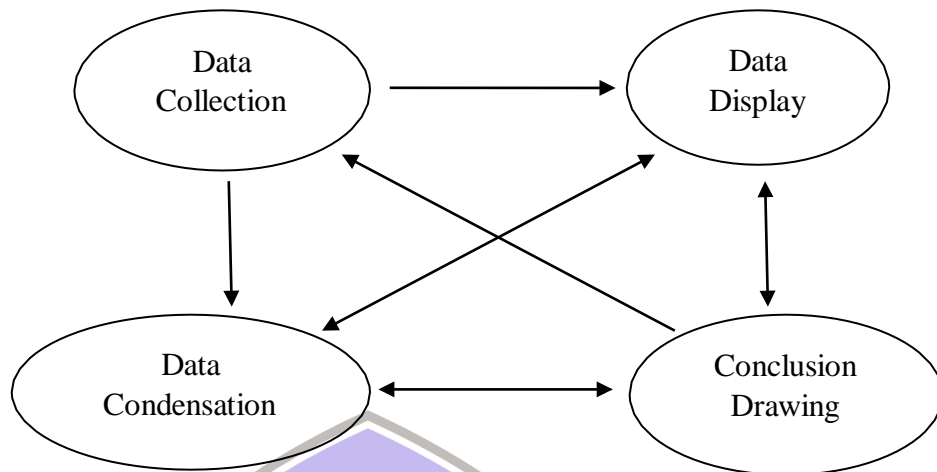
Kondensasi data mengarah pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mentransformasikan dan mengabstraksikan seluruh data mulai dari catatan tangan data lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan atau materi empiris lainnya. Pemadatan data merupakan suatu proses analisis dengan cara memilih, membuang, memfokuskan, mengatur dan menyusun data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan memadatkan data-data tersebut, maka menghasilkan data yang lebih kuat dan menghasilkan data yang lebih fokus pada penelitian.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sajian data yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk kumpulan data sangat terorganisir dan informasi yang dapat disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk deskriptif, bagan, grafik, dan matriks sehingga informasi yang ditampilkan sangat terorganisir, ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, penyajian data dapat mempermudah dalam memahami konteks penelitian karena memerlukan analisis yang mendalam.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Pada analisis kualitatif, dari awal mengumpulkan data peneliti menerjemahkan apa yang dimaksud dengan cara mencatat pola, alur sebab akibat dan menulis keteraturan penjelasan dengan tahap akhir menyimpulkan data yang diperoleh.



Gambar 1.2 Model Analisis Data

Sumber: Miles dkk, (2014)

